

Politik Pendidikan dan Kekuasaan Dalam Pendidikan

Dela Desra Murni¹, Pariyal Nadianto², Januar³

^{1,2,3} Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Syech M. Djamil

Djambek Bukittinggi:

Alamat e-mail: Deladesra1308@gmail.com¹, Pariyalnadianto7@gmail.com²,
januar@uinbukittinggi.ac.id³

Abstract

This study discusses the relationship between politics, education, and power in the context of the national education system. Educational politics is understood as the process of decision-making, policy formulation, and implementation of actions in the field of education that are influenced by the ideological, social, economic, and cultural interests of a nation. Education is not neutral because it is always under the influence of political power that determines the direction, content, and objectives of education. This study uses the library research method by examining various relevant literature to analyze the relationship between politics, power, and education. The results of the study show that politics plays a role in determining curriculum policy, learning systems, and the distribution of educational resources, while power functions as an instrument of control and direction for the implementation of these policies. Education, in turn, plays a role as a means of shaping the political, moral, and social awareness of citizens so that they are able to actively participate in the life of the nation and state. This reciprocal relationship shows that education can be a tool of power to maintain political legitimacy, but it can also serve as a means of liberation and empowerment for the community if it is carried out democratically and fairly. Therefore, politics, education, and power must work together to create an education system that is fair, democratic, and human-oriented.

Keywords: *Education, Politics, Educational Power*

Abstrak

Penelitian ini membahas hubungan antara politik, pendidikan, dan kekuasaan dalam konteks sistem pendidikan nasional. Politik pendidikan dipahami sebagai proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan tindakan dalam bidang pendidikan yang dipengaruhi oleh kepentingan ideologis, sosial, ekonomi, dan budaya suatu bangsa. Pendidikan tidak bersifat netral karena selalu berada dalam pengaruh kekuasaan politik yang menentukan arah, isi, dan tujuan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan untuk menganalisis keterkaitan antara politik, kekuasaan, dan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik berperan dalam menentukan kebijakan kurikulum, sistem pembelajaran, serta distribusi sumber

daya pendidikan, sedangkan kekuasaan berfungsi sebagai instrumen pengendali dan pengarah terhadap implementasi kebijakan tersebut. Pendidikan pada gilirannya berperan sebagai sarana pembentukan kesadaran politik, moral, dan sosial warga negara agar mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan timbal balik ini menunjukkan bahwa pendidikan dapat menjadi alat kekuasaan untuk mempertahankan legitimasi politik, namun juga dapat berfungsi sebagai sarana pembebasan dan pemberdayaan masyarakat jika dijalankan secara demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, politik, pendidikan, dan kekuasaan harus bersinergi untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kemanusiaan.

Kata Kunci: Politik, Pendidikan, Kekuasaan Pendidik

A. Pendahuluan

Politik pendidikan dan kekuasaan dalam pendidikan merupakan topik penting yang membahas hubungan antara proses politik, kebijakan negara, serta penggunaan kekuasaan dalam mengatur dan menentukan arah sistem pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya tidak pernah berdiri secara netral atau bebas nilai, melainkan selalu dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan ideologis yang berkembang dalam masyarakat. Dalam setiap sistem pemerintahan baik demokratis maupun otoriter pendidikan berfungsi tidak hanya sebagai sarana mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk watak, pola pikir, dan perilaku warga negara agar sejalan dengan visi politik dan tujuan nasional yang dikehendaki penguasa (Kholik, 2025). Oleh karena itu, pendidikan dapat dipandang sebagai bidang strategis di mana kekuasaan politik bekerja untuk menanamkan nilai-nilai

tertentu, memperkuat legitimasi kekuasaan serta menyiapkan sumber daya manusia yang mendukung pembangunan nasional.

Keterkaitan antara politik, pendidikan, dan kekuasaan dapat dilihat dalam setiap kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah, seperti perumusan kurikulum, penyusunan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, penentuan anggaran pendidikan dan pembinaan lembaga-lembaga pendidikan. Semua kebijakan tersebut merupakan hasil dari proses politik yang melibatkan kekuasaan, kepentingan, dan ideologi tertentu. Dalam konteks ini, kekuasaan memiliki peran sentral karena menentukan siapa yang berhak mengakses pendidikan, ilmu apa yang dianggap penting untuk diajarkan dan nilai-nilai apa yang perlu ditanamkan dalam sistem pendidikan. Kekuasaan dapat digunakan untuk tujuan positif, yaitu menciptakan keadilan, pemerataan, dan kemajuan pendidikan, namun

juga dapat disalahgunakan untuk mempertahankan dominasi, menanamkan ideologi sempit, dan menghambat kebebasan berpikir.

Politik pendidikan sebagai wujud nyata dari kekuasaan negara dalam bidang pendidikan bertujuan untuk mengarahkan sistem pendidikan agar sesuai dengan ideologi, nilai, dan cita-cita bangsa. Di Indonesia, politik pendidikan diarahkan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Samoto, 2012). Melalui politik pendidikan, negara memiliki kewenangan untuk menentukan arah kurikulum, sistem pembelajaran, kebijakan guru, serta pemerataan akses pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Namun demikian, politik pendidikan tidak hanya bersifat top-down dari pemerintah kepada masyarakat tetapi juga bersifat interaktif karena masyarakat dapat memberikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pendidikan yang dianggap tidak adil atau tidak relevan dengan kebutuhan zaman (Iswahyudi et al., 2023).

Di sisi lain, kekuasaan dalam pendidikan bukan hanya dimiliki oleh negara, tetapi juga terdapat pada berbagai tingkatan seperti lembaga pendidikan, kepala sekolah, guru, bahkan masyarakat. Guru, misalnya memiliki kekuasaan dalam menentukan proses pembelajaran

dan evaluasi peserta didik. Kepala sekolah memiliki kekuasaan dalam mengatur kebijakan internal lembaga pendidikan, sementara masyarakat memiliki kekuasaan sosial dalam mengawasi dan menilai keberhasilan sistem pendidikan. Semua bentuk kekuasaan ini saling berinteraksi dan menentukan bagaimana pendidikan dijalankan dalam praktiknya.

Selain itu, politik pendidikan dan kekuasaan memiliki dimensi ideologis yang sangat kuat. Pendidikan sering kali digunakan sebagai alat untuk menanamkan ideologi negara agar generasi muda memiliki kesadaran politik yang sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku. Dalam konteks demokrasi, pendidikan diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran kritis, partisipasi politik, dan tanggung jawab sosial. Namun dalam sistem otoriter, pendidikan dapat dijadikan alat indoktrinasi untuk membentuk kepatuhan terhadap kekuasaan dan menghilangkan kebebasan berpikir. Oleh karena itu, politik pendidikan dan kekuasaan memiliki dua wajah sebagai alat pemberdayaan masyarakat atau sebagai alat penundukan terhadap masyarakat.

Dalam perkembangan global saat ini hubungan antara politik, pendidikan, dan kekuasaan menjadi semakin kompleks. Globalisasi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial menuntut adanya kebijakan pendidikan yang adaptif dan berkeadilan. Negara harus mampu menggunakan kekuasaannya

secara bijak untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi alat kekuasaan politik semata tetapi juga menjadi sarana pembebasan dan pencerahan bagi seluruh rakyat. Pendidikan harus diarahkan untuk membentuk masyarakat yang cerdas, kritis, dan berkeadaban, bukan hanya masyarakat yang tunduk pada kekuasaan.

Dengan demikian, pembahasan tentang politik pendidikan dan kekuasaan dalam pendidikan menjadi sangat penting karena melalui kajian ini kita dapat memahami bagaimana kekuasaan politik bekerja dalam dunia pendidikan, bagaimana kebijakan pendidikan dibentuk serta bagaimana pendidikan dapat menjadi alat strategis untuk membangun peradaban dan keadilan sosial. Materi ini juga mengajak kita untuk meninjau kembali fungsi sejati pendidikan sebagai sarana untuk membebaskan manusia bukan sekadar memperkuat sistem kekuasaan yang ada sehingga pada akhirnya politik, pendidikan, dan kekuasaan dapat berjalan seimbang untuk mencapai tujuan kemanusiaan dan kemajuan bangsa.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih untuk menggali dan menganalisis tentang Politik Pendidikan dan Kekuasaan Dalam Pendidikan

berdasarkan literatur yang relevan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan Politik Pendidikan dan Kekuasaan Dalam Pendidikan. Data dianalisis yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menggambarkan bentuk-bentuk integrasi Politik Pendidikan dan Kekuasaan Dalam Pendidikan. Analisis dilakukan dalam beberapa tahap: pertama, reduksi data dengan memilah informasi yang relevan; kedua, penyajian data dalam bentuk naratif yang sistematis; dan ketiga, penarikan kesimpulan berdasarkan temuan literatur yang dikaji. Validitas data diperkuat dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi untuk memperoleh keakuratan dan konsistensi informasi.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Hakikat Pendidikan Politik

a. Pengertian Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran yang bertujuan membentuk kesadaran, pengetahuan, sikap, dan perilaku politik warga negara agar memahami hak serta kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan ini mencakup usaha untuk menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam sistem politik secara sadar, kritis, dan

bertanggung jawab. Secara konseptual pendidikan politik mengajarkan bagaimana kekuasaan dijalankan bagaimana keputusan publik diambil serta bagaimana warga negara dapat berperan dalam memengaruhi kebijakan (Mulia, 2024). Hakikatnya pendidikan politik merupakan sarana pembentukan karakter politik bangsa agar rakyat tidak apatis, tidak mudah terprovokasi dan mampu menggunakan hak politiknya secara rasional untuk kepentingan bersama.

b. Tujuan Pendidikan Politik

Pendidikan politik dapat dikatakan sebagai media penyampaian konsep politik yang memiliki tujuan akhir untuk membuat warga negara menjadi lebih melek. Warga negara yang melek politik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga dapat ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap proses pembangunan (Azmi, 2023).

Pendidikan politik diperlukan keberadaannya terutama untuk mendidik generasi muda saat ini yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Instruksi Presiden (Inpres) No. 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi Generasi Muda menyatakan bahwa tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran

kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya (Prayugo & Prayitno, 2022).

Berdasarkan pemaparan tentang tujuan pendidikan politik di atas penulis berpendapat bahwa yang menjadi tujuan utama dari pendidikan politik adalah agar generasi muda saat ini memiliki kemampuan untuk memahami situasi sosial politik penuh konflik. Aktivitas yang dilakukan pun diarahkan pada proses demokratisasi serta berani bersikap kritis terhadap kondisi masyarakat di lingkungannya. Pendidikan politik mengajarkan mereka untuk mampu mengembangkan semua bakat dan kemampuannya dalam aspek kognitif, wawasan kritis, sikap positif, dan keterampilan politik ((Prayugo & Prayitno, 2022)).

Kesemua itu dirancang agar mereka dapat mengaktualisasikan diri dengan jalan ikut berpartisipasi secara aktif dalam bidang politik. Singkat kata pendidikan politik dapat membentuk kepribadian, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Ruang Lingkup Pendidikan Politik

Ruang lingkup pendidikan politik mencakup beberapa aspek penting yang saling berkaitan yaitu: 1) Aspek Pengetahuan Politik yaitu meliputi pemahaman tentang sistem politik, struktur kekuasaan, lembaga-lembaga politik seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mekanisme pemerintahan, serta proses politik seperti pemilu, partisipasi warga negara, dan pembuatan kebijakan publik. 2) Aspek Kesadaran Politik yaitu meliputi pembentukan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, kesadaran terhadap pentingnya demokrasi, keadilan, dan tanggung jawab politik, serta pemahaman terhadap peran individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3) Aspek Sikap Politik yaitu mencakup pembentukan sikap positif terhadap nilai-nilai demokrasi, toleransi, keadilan sosial, supremasi hukum, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat serta keanekaragaman politik di masyarakat. 4) Aspek Partisipasi Politik yaitu mencakup dorongan dan pembinaan warga negara untuk aktif dalam kegiatan politik seperti pemilihan umum, organisasi kemasyarakatan, diskusi publik, gerakan sosial, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. 5) Aspek Nilai dan Etika Politik yaitu meliputi penanaman nilai moral dan etika dalam berpolitik seperti kejujuran, tanggung jawab,

amanah, integritas, serta penghindaran dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 6) Aspek Sosialisasi Politik yaitu meliputi proses pewarisan nilai-nilai, norma, dan budaya politik dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, media massa, dan organisasi masyarakat. 7) Aspek Keterampilan Politik yaitu meliputi pengembangan kemampuan berpikir kritis, berargumentasi, bernegosiasi, memimpin, dan mengambil keputusan secara rasional dan bertanggung jawab dalam konteks kehidupan politik. 8) Aspek Kebijakan dan Kelembagaan yaitu mencakup pemahaman tentang hubungan antara politik dan kebijakan publik, fungsi partai politik, lembaga legislatif, serta peran masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan. 9) Aspek Globalisasi Politik yaitu mencakup pemahaman terhadap dinamika politik internasional, hubungan antarnegara, organisasi global seperti PBB, ASEAN, serta pengaruh global terhadap sistem politik nasional. 10) Aspek Pendidikan dan Pembinaan Warga Negara yaitu meliputi usaha membentuk warga negara yang memiliki kesadaran politik tinggi, berpikir kritis terhadap isu-isu publik, serta mampu berperan aktif dalam pembangunan politik yang berkeadilan dan demokratis (Sutrisman, 2019).

d. Pentingnya Pendidikan Politik

Pentingnya pendidikan politik terletak pada perannya dalam membentuk warga negara yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena pendidikan politik berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan supremasi hukum agar setiap individu mampu memahami hak serta kewajiban politiknya dalam masyarakat (Sofiyah & Muthowif, 2025). Pendidikan politik penting untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar tidak apatis terhadap isu-isu publik dan pemerintahan serta agar mampu menilai dan berpartisipasi secara aktif dalam proses politik seperti pemilihan umum, pembuatan kebijakan, dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Pendidikan politik juga membantu masyarakat memahami mekanisme kekuasaan dan proses pengambilan keputusan dalam negara sehingga mereka tidak mudah dimanipulasi oleh kepentingan politik yang sempit. Melalui pendidikan politik masyarakat dapat mengembangkan sikap kritis terhadap kebijakan publik, berpikir rasional dalam memilih pemimpin, dan menolak praktik politik uang, korupsi, kolusi, serta nepotisme (Hermanto et al., 2025). Pendidikan politik menjadi

penting karena tanpa pengetahuan dan kesadaran politik yang memadai, masyarakat mudah terjebak dalam sikap apatis, fanatisme buta, atau bahkan manipulasi ideologis yang merugikan kepentingan bangsa. Pendidikan politik juga menjadi sarana untuk memperkuat partisipasi politik masyarakat di semua level pemerintahan baik lokal maupun nasional, karena dengan memahami hak politiknya warga negara terdorong untuk turut serta dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan publik yang adil serta berpihak pada rakyat. Selain itu, pendidikan politik berfungsi membangun budaya politik yang sehat, terbuka, dan toleran di mana perbedaan pandangan tidak menimbulkan konflik tetapi menjadi sarana dialog yang produktif untuk mencapai kebaikan bersama. Pendidikan politik juga berperan dalam membentuk karakter warga negara yang demokratis, jujur, disiplin, dan berintegritas sehingga mampu menjadi agen perubahan sosial yang positif dalam masyarakat. Di sisi lain, pendidikan politik membantu generasi muda memahami sejarah perjuangan bangsa, nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan makna kebangsaan agar mereka tidak kehilangan identitas nasional di tengah pengaruh globalisasi dan modernisasi. Pendidikan politik penting untuk

menumbuhkan kesadaran bahwa politik bukan hanya urusan elite, melainkan tanggung jawab semua warga negara dalam menjaga keutuhan, keadilan, dan kemakmuran bangsa. Melalui pendidikan politik masyarakat dapat memahami bagaimana sistem politik bekerja, siapa aktor-aktor yang terlibat, bagaimana kebijakan publik dirumuskan, serta bagaimana rakyat dapat berperan dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Pendidikan politik juga mendorong terciptanya stabilitas politik karena masyarakat yang cerdas secara politik akan menyalurkan aspirasi dengan cara-cara yang konstitusional dan damai, bukan melalui kekerasan atau provokasi. Pendidikan politik berfungsi memperkuat legitimasi sistem politik yang demokratis karena rakyat yang paham politik akan lebih mudah menerima hasil keputusan politik berdasarkan hukum dan proses yang sah. Selain itu, pendidikan politik juga menjadi benteng terhadap radikalisme, intoleransi, dan disinformasi politik karena warga yang berpendidikan politik mampu menyeleksi informasi secara kritis dan berpikir logis dalam menanggapi isu-isu publik. Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan politik menjadi faktor penentu keberhasilan demokrasi karena hanya melalui masyarakat yang terdidik secara politik, sistem pemerintahan yang transparan,

akuntabel, dan partisipatif dapat terwujud. Pendidikan politik juga menumbuhkan kepedulian sosial dan solidaritas kebangsaan sehingga setiap individu merasa memiliki tanggung jawab bersama terhadap kemajuan bangsa. Dengan demikian, pentingnya pendidikan politik tidak hanya terletak pada aspek kognitif atau pengetahuan tentang politik, tetapi juga mencakup pembentukan sikap, nilai, dan keterampilan politik yang menjadikan warga negara aktif, cerdas, dan berakhlak dalam kehidupan politik, sosial, dan kemasyarakatan.

2. Politik Pendidikan dan Kekuasaan

Politik pendidikan dan kekuasaan adalah konsep yang menjelaskan hubungan erat antara proses politik, kebijakan pendidikan, dan penggunaan kekuasaan dalam menentukan arah serta tujuan pendidikan suatu negara, politik pendidikan berarti proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan tindakan dalam bidang pendidikan yang dipengaruhi oleh kepentingan serta kekuasaan politik untuk mencapai tujuan ideologis dan sosial bangsa. Politik pendidikan berfungsi sebagai alat bagi pemerintah untuk mengatur sistem pendidikan melalui kebijakan kurikulum, pengelolaan lembaga, alokasi anggaran, dan pembentukan karakter warga negara sesuai ideologi yang dianut.

Sedangkan kekuasaan dalam pendidikan adalah kemampuan atau otoritas yang dimiliki pihak tertentu seperti pemerintah, birokrat, lembaga pendidikan, atau guru untuk mengendalikan, mengarahkan, dan memengaruhi kebijakan serta praktik pendidikan, kekuasaan ini menentukan siapa yang berhak mendapat pendidikan bagaimana isi kurikulum disusun dan nilai-nilai apa yang ditanamkan dalam proses belajar. Politik pendidikan dan kekuasaan saling berkaitan karena kekuasaan digunakan untuk mewujudkan kebijakan pendidikan yang diinginkan. Sementara pendidikan menjadi sarana untuk mempertahankan, mengkritik, atau mengubah struktur kekuasaan yang ada, dengan demikian politik pendidikan dan kekuasaan menggambarkan dinamika antara penguasa, kebijakan, dan masyarakat dalam menentukan bentuk serta arah pendidikan nasional (Zahro et al., 2023).

a. Pengertian Politik Pendidikan

Pengertian politik pendidikan adalah keseluruhan proses, kebijakan, dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak yang memiliki kekuasaan dalam rangka mengatur, mengendalikan, serta mengarahkan penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan tujuan dan kepentingan ideologis, sosial, ekonomi, dan budaya suatu negara. Politik pendidikan mencakup bagaimana kekuasaan digunakan untuk menentukan arah, isi, struktur, dan sistem

pendidikan yang akan membentuk karakter serta pola pikir warga negara. Politik pendidikan bukan hanya sebatas kegiatan administratif atau teknis pendidikan, melainkan suatu strategi politik dalam menciptakan tatanan masyarakat yang sesuai dengan nilai dan visi yang diinginkan penguasa. Dalam hal ini pendidikan dipandang sebagai instrumen sosial dan politik yang berfungsi untuk menanamkan ideologi, memperkuat legitimasi kekuasaan, serta menyiapkan sumber daya manusia yang mendukung pembangunan nasional. Politik pendidikan juga melibatkan proses perumusan kebijakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pendidikan yang dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, dan ideologi. Kebijakan tersebut mencakup kurikulum, sistem ujian, pemerataan akses pendidikan, pengelolaan guru, serta penentuan standar mutu pendidikan. Melalui politik pendidikan pemerintah berupaya membentuk warga negara yang memiliki kesadaran politik, moral, dan tanggung jawab terhadap negara, selain itu politik pendidikan berfungsi menjaga stabilitas nasional dengan menjadikan pendidikan sebagai sarana sosialisasi nilai-nilai ideologis seperti Pancasila, nasionalisme, dan demokrasi. Dalam konteks yang lebih luas politik pendidikan juga

mencerminkan perjuangan antara kelompok-kelompok sosial dalam memperebutkan pengaruh terhadap isi dan arah pendidikan karena setiap kelompok memiliki kepentingan dan ideologi yang berbeda, politik pendidikan berperan penting dalam menentukan siapa yang berhak mengakses pendidikan, jenis ilmu apa yang dikembangkan serta nilai-nilai apa yang harus ditanamkan di sekolah. Oleh karena, itu politik pendidikan dapat dipahami sebagai wujud interaksi antara kekuasaan, kebijakan publik, dan kepentingan masyarakat dalam membentuk sistem pendidikan nasional yang berkeadilan berkualitas dan sesuai dengan tujuan negara. Politik pendidikan juga menegaskan bahwa pendidikan tidak pernah netral, melainkan selalu dipengaruhi oleh kekuatan politik yang berperan di dalamnya, baik secara langsung melalui kebijakan pemerintah maupun secara tidak langsung melalui pengaruh ideologi, budaya, ekonomi, dan kekuasaan global, sehingga pengertian politik pendidikan mencakup seluruh proses bagaimana kekuasaan digunakan untuk mengatur dan mengarahkan pendidikan agar mampu membentuk masyarakat yang diharapkan oleh sistem politik yang berlaku.

b. Kekuasaan dalam Pendidikan

Kekuasaan dalam pendidikan adalah kemampuan, otoritas, atau wewenang yang dimiliki oleh

individu, lembaga, atau kelompok tertentu untuk mengatur, mengendalikan, memengaruhi, dan menentukan arah, isi, serta pelaksanaan proses pendidikan sesuai dengan kepentingan dan tujuan tertentu. Kekuasaan ini dapat bersumber dari pemerintah, lembaga pendidikan, guru, birokrat, bahkan ideologi yang mendominasi sistem pendidikan dalam konteks ini kekuasaan tidak selalu bersifat negatif melainkan bisa berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan memastikan mutu dan mencapai tujuan pendidikan nasional, kekuasaan dalam pendidikan terlihat dalam proses pengambilan keputusan seperti penyusunan kurikulum (Duryat Sahrodi, 2021). Kekuasaan yang disalahgunakan dapat melahirkan dominasi dan ketidakadilan seperti diskriminasi akses pendidikan, kurikulum yang bias ideologi, atau penekanan terhadap kebebasan berpikir siswa. Oleh karena itu, kekuasaan dalam pendidikan harus disertai dengan prinsip partisipasi, transparansi, dan tanggung jawab sosial agar fungsi pendidikan tetap mengarah pada pembebasan dan pemberdayaan manusia, kekuasaan dalam pendidikan juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai politik, moral, dan ideologi negara melalui sistem kurikulum dan kegiatan belajar mengajar, di sisi lain kekuasaan dapat menjadi

alat untuk mempertahankan struktur sosial yang ada, misalnya dengan menjadikan pendidikan sebagai sarana reproduksi sosial di mana nilai, budaya, dan kepentingan kelas dominan terus diwariskan, namun kekuasaan juga dapat digunakan sebagai alat perubahan sosial apabila diarahkan untuk menciptakan kesetaraan, keadilan, dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara, tokoh seperti Michel Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan dalam pendidikan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif karena melahirkan pengetahuan, disiplin, dan struktur berpikir tertentu yang membentuk perilaku manusia. Hal ini terlihat dari bagaimana sekolah mengatur waktu, perilaku, bahasa, dan pola pikir siswa sesuai norma yang diinginkan masyarakat, kekuasaan juga bekerja melalui kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) yaitu nilai-nilai dan ideologi yang tidak secara eksplisit diajarkan namun tertanam dalam proses pembelajaran dengan demikian kekuasaan dalam pendidikan mencakup seluruh bentuk pengaruh yang digunakan untuk mengontrol arah pendidikan baik melalui kebijakan formal, praktik pembelajaran, maupun sistem nilai yang berlaku sehingga kekuasaan dalam pendidikan menjadi unsur utama yang menentukan keberhasilan,

keadilan, dan kualitas sistem pendidikan dalam membentuk manusia yang berpengetahuan, berkarakter, dan berdaya dalam kehidupan sosial politik.

c. Politik pendidikan sebagai alat kekuasaan

Politik pendidikan sebagai alat kekuasaan adalah pendidikan dijadikan sarana strategis oleh penguasa atau pemerintah untuk mempertahankan, memperluas, dan melegitimasi kekuasaan yang dimilikinya melalui proses pengaturan, pembentukan, serta pengendalian sistem pendidikan agar sejalan dengan ideologi dan kepentingan politik yang berlaku. Pendidikan dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai proses pembelajaran dan pengembangan pengetahuan tetapi juga sebagai instrumen politik untuk membentuk cara berpikir, sikap, dan perilaku warga negara agar mendukung sistem kekuasaan yang sedang berkuasa, penguasa menggunakan kebijakan pendidikan seperti kurikulum, buku ajar, bahasa pengantar, dan sistem evaluasi untuk menanamkan ideologi tertentu yang memperkuat legitimasi kekuasaan, misalnya dalam negara demokratis pendidikan diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai kebebasan, partisipasi, dan kesetaraan, sementara dalam negara otoriter pendidikan sering digunakan untuk membentuk kepatuhan,

ketaatan, dan loyalitas kepada penguasa (Yacub et al., 2024).

Politik pendidikan sebagai alat kekuasaan juga terlihat dalam pengaturan struktur kelembagaan pendidikan di mana pemerintah memiliki kontrol penuh terhadap arah, dana, dan isi pendidikan. Melalui mekanisme ini kekuasaan dapat menentukan siapa yang berhak mendapat pendidikan jenis ilmu apa yang dianggap penting dan nilai-nilai apa yang harus ditanamkan hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak pernah netral melainkan selalu dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan. Kekuasaan dalam pendidikan bekerja secara halus melalui proses indoktrinasi dan sosialisasi nilai-nilai ideologis yang ditanamkan sejak dini kepada peserta didik agar mereka tumbuh menjadi warga negara yang patuh terhadap sistem yang ada, selain itu politik pendidikan sebagai alat kekuasaan juga digunakan untuk membatasi akses terhadap pengetahuan tertentu agar masyarakat tidak memiliki kesadaran kritis yang bisa mengancam stabilitas kekuasaan.

Pendidikan dalam hal ini menjadi alat reproduksi sosial di mana struktur kekuasaan, nilai-nilai dominan, dan kepentingan elit politik terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, namun kekuasaan juga dapat menggunakan pendidikan secara positif yaitu

untuk memperkuat stabilitas politik, membangun identitas nasional, dan meningkatkan partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa. Politik pendidikan sebagai alat kekuasaan juga tampak dalam peran lembaga pendidikan sebagai agen kontrol sosial yang berfungsi menanamkan disiplin, moral, dan norma-norma yang mendukung keteraturan sosial yang diinginkan oleh penguasa, dalam praktiknya penguasa sering menggunakan simbol-simbol pendidikan seperti upacara bendera, pelajaran sejarah, dan pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat nasionalisme dan legitimasi politik, di sisi lain pendidikan juga dapat menjadi sarana perlawanan terhadap kekuasaan yang tidak adil ketika peserta didik dan pendidik memiliki kesadaran kritis sebagaimana ditegaskan oleh Paulo Freire bahwa pendidikan seharusnya menjadi alat pembebasan bukan penindasan. Oleh karena itu, politik pendidikan sebagai alat kekuasaan memiliki dua sisi yaitu sebagai alat dominasi ketika digunakan untuk mempertahankan kekuasaan tanpa keadilan dan sebagai alat transformasi ketika diarahkan untuk mencerdaskan dan membebaskan masyarakat, dalam konteks Indonesia politik pendidikan sebagai alat kekuasaan terlihat dari upaya pemerintah dalam mengatur

sistem pendidikan nasional melalui Undang-Undang, kurikulum, serta kebijakan pendidikan yang disesuaikan dengan ideologi Pancasila dan tujuan pembangunan nasional, hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan politik memegang peran penting dalam menentukan arah pendidikan dan bahwa pendidikan menjadi instrumen efektif untuk menjaga keberlangsungan sistem politik yang ada, dengan demikian politik pendidikan sebagai alat kekuasaan menggambarkan bagaimana pendidikan dijadikan medium untuk melegitimasi, mengontrol, dan mempertahankan kekuasaan melalui pembentukan kesadaran politik, nilai ideologis, dan karakter warga negara sesuai kepentingan penguasa.

3. Hakikat Hubungan Politik Dan Pendidikan

Hakikat hubungan politik dan pendidikan adalah keterkaitan yang sangat erat dan bersifat timbal balik antara dua sistem penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di mana politik berfungsi sebagai pengatur arah, kebijakan, serta tujuan pendidikan sedangkan pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk membentuk kesadaran politik, moral, dan sosial warga negara agar mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Hubungan antara politik dan pendidikan tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling

memengaruhi dan saling membutuhkan (Yacub et al., 2024).

Politik membutuhkan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai ideologi, membentuk karakter warga negara yang loyal serta menciptakan sumber daya manusia yang mendukung keberlangsungan sistem pemerintahan. Sementara pendidikan membutuhkan politik agar mendapat dukungan kekuasaan, kebijakan, pendanaan, serta perlindungan hukum dalam penyelenggaraannya.

Politik menjadi landasan bagi perumusan kebijakan pendidikan seperti kurikulum, sistem pembelajaran, anggaran pendidikan, dan manajemen lembaga pendidikan. Sedangkan pendidikan berperan membentuk warga negara yang memiliki kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, dan kemampuan berpikir kritis untuk menilai serta mengontrol kekuasaan.

Hakikat hubungan ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan kegiatan yang netral karena selalu berada dalam pengaruh kekuasaan politik yang menentukan arah dan isinya, politik dapat menggunakan pendidikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan melalui penanaman ideologi tertentu atau sebaliknya pendidikan dapat menjadi alat pembebasan masyarakat dari dominasi politik yang tidak adil dengan menumbuhkan kesadaran kritis. Hubungan politik dan pendidikan bersifat fungsional dan saling melengkapi di mana

pendidikan menjadi wahana sosialisasi nilai-nilai politik seperti nasionalisme, demokrasi, keadilan, dan kebebasan, sementara politik menjamin agar pendidikan berjalan dalam kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung tercapainya tujuan nasional dalam sistem demokratis hubungan ini bersifat terbuka dan partisipatif di mana pendidikan diarahkan untuk mencetak warga negara yang kritis, rasional, dan sadar hak serta kewajiban politiknya (Sutrisman, 2019).

Sedangkan dalam sistem otoriter hubungan ini bersifat dominatif di mana pendidikan dijadikan alat indoktrinasi untuk menanamkan kepatuhan terhadap kekuasaan, dengan demikian hakikat hubungan politik dan pendidikan terletak pada peran keduanya dalam membangun manusia dan masyarakat yang berpengetahuan, bermoral, serta berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, politik memberikan arah dan kerangka struktural bagi pendidikan sementara pendidikan menyediakan dasar intelektual dan moral bagi politik (Suharto, 2012).

Hubungan ini juga menegaskan bahwa keberhasilan sistem politik sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan sebaliknya keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik yang adil dan berpihak pada kepentingan rakyat, politik tanpa pendidikan akan kehilangan arah moral dan intelektual, sedangkan pendidikan tanpa politik akan kehilangan orientasi sosial dan arah

pembangunan. Oleh karena itu, hakikat hubungan politik dan pendidikan adalah keterpaduan antara kekuasaan dan pengetahuan dalam menciptakan sistem sosial yang berkeadilan, berkeadaban dan berkelanjutan di mana pendidikan menjadi pondasi bagi lahirnya masyarakat yang sadar politik, kritis terhadap kebijakan, serta mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa, sementara politik menjamin bahwa pendidikan tetap menjadi sarana mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam tujuan nasional, sehingga keduanya berfungsi secara sinergis untuk membentuk peradaban yang maju, adil, dan demokratis.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa politik, pendidikan, dan kekuasaan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik berperan dalam menentukan arah, isi, dan tujuan pendidikan melalui kebijakan publik, pengaturan kurikulum, serta pengelolaan lembaga pendidikan. Kekuasaan menjadi instrumen utama dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, baik melalui pemerintah, lembaga pendidikan, maupun guru sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Sementara itu, pendidikan berfungsi tidak hanya sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai media pembentukan kesadaran politik, moral, dan sosial masyarakat agar mampu

berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik secara kritis dan bertanggung jawab.

Politik pendidikan yang dijalankan secara adil, demokratis, dan berpihak pada rakyat akan melahirkan sistem pendidikan yang berkeadilan serta berorientasi pada kemanusiaan, sedangkan penyalahgunaan kekuasaan dalam pendidikan dapat menjadikan pendidikan sebagai alat dominasi dan penindasan ideologis. Oleh karena itu, sinergi antara politik, pendidikan, dan kekuasaan harus diarahkan untuk membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan berkeadaban guna mewujudkan cita-cita nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ahkami, N., Maesaroh, S., & Asy'ari, H. (2025). Peran Politik, Kekuasaan, Dan Manajemen Konflik Dalam Manajemen Pendidikan. *Manajerial: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(1), 258-268.
- Azmi, L. (2023). Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2), 173-186.
- Duryat, H. M., & Sahrodi, H. J. (2021). *Manajemen Pendidikan AntiKorupsi: (Wacana Kritis atas Etika Kekuasaan dan Budaya Mematuhi Melalui Pendidikan)*. K-Media.
- Hermanto, B., Amrullah, M. F., Khu, S., Permatasari, L., Fadlilah, N. A., & Nugroho, B. A. S. (2025). Pendidikan Politik Bagi Siswa SMA Negeri 2 Brebes Sebagai Upaya Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih Generasi Muda di Kabupaten Brebes. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(7), 3683-3694.
- Hermanto, B., Amrullah, M. F., Khu, S., Permatasari, L., Fadlilah, N. A., & Nugroho, B. A. S. (2025). Pendidikan Politik Bagi Siswa SMA Negeri 2 Brebes Sebagai Upaya Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih Generasi Muda di Kabupaten Brebes. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(7), 3683-3694.
- Kholik, M. (2025). *Politik Pendidikan Islam*. AE Publishing.
- Mulia, A. A. M. (2024). Pendidikan Politik dan Manfaat Peranannya Di Masyarakat. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 3(6), 515-532.
- Prayugo, A., & Prayitno, R. B. P. (2022). Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan. *EDUKASIA Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(3), 427-442.
- Prayugo, A., & Prayitno, R. B. P. (2022). Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran

- Kewarganegaraan. *Edukasia Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(3), 427-442.
- Sarnoto, A. Z. (2012). Konsepsi politik pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educhild*, 1(1). Iswahyudi, M. S., Irianto, I., Salong, A., Nurhasanah, N., Leuwol, F. S., Januaripin, M., & Harefa, E. (2023). *Kebijakan dan inovasi pendidikan: Arah pendidikan di masa depan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sofiyah, S. L., & Muthowif, M. (2025). Sistem Politik Indonesia. *AMU Press*, 1-249.
- Suharto, T. (2012). *Pendidikan Berbasis Masyarakat; Relasi Negara dan Masyarakat dalam Pendidikan*. LKIS Pelangi Aksara.
- Sutrisman, D. (2019). *Pendidikan politik, persepsi, kepemimpinan, dan mahasiswa*. Guepedia.
- Sutrisman, D. (2019). *Pendidikan politik, persepsi, kepemimpinan, dan mahasiswa*. Guepedia.
- Yacub, J., Permatasari, E., & Kholijah, S. (2024). Keterkaitan Antara Politik Pendidikan, Kebijakan Pendidikan Dan Kekuasaan Serta Implikasinya Pada Praktek Pendidikan Di Lembaga Pendidikan (Islam). *Jurnal Pengembangan Profesi Guru (JPPG)*, 2(1), 1-14.
- Yacub, J., Permatasari, E., & Kholijah, S. (2024). Keterkaitan Antara Politik Pendidikan, Kebijakan Pendidikan Dan Kekuasaan Serta Implikasinya Pada Praktek Pendidikan Di Lembaga Pendidikan (Islam). *Jurnal Pengembangan Profesi Guru (JPPG)*, 2(1), 1-14.
- Zahro, S., Kamilah, M. N., Ardiansyah, M., Safitri, I. M., Naharina, P. S., & Waraswati, A. N. (2023). Kesadaran Berpolitik Di Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(2), 49-64.